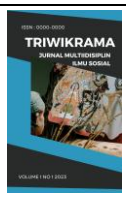
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



E-PARTICIPATION DAN KESENJANGAN AKUNTABILITAS DIGITAL: ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI JAKI DALAM TRANSFORMASI DEMOKRASI LOKAL DI ERA PEMERINTAHAN GUBERNUR PRAMONO

Raden Muhammad Maulana Ishaq[1], Sayyid Verrel[2], Alexander Josan Murtanto[3]
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober 2025
Revised Oktober 2025
Accepted Oktober 2025
Available online Oktober 2025

Email:
24104131080@mahasiswa.upnvj.ac.id[1],
2410413112@mahasiswa.upnvj.ac.id[2],
2410413178@mahasiwa.upnvj.ac.id[3]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author..

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi *E-Participation* melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) di era Gubernur Pramono, berfokus pada kesenjangan antara janji teknologi dan realitas akuntabilitas digital. Menggunakan kerangka Teori *Open Government* dan *Digital Democracy*, penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif melalui survei daring (skala Likert) terhadap pengguna JAKI di lingkungan UPNVJ untuk menguji hubungan antara Intensitas Penggunaan JAKI (Variabel X) dan Tingkat Partisipasi Digital Warga (Variabel Y). Tinjauan literatur mengkonfirmasi dualisme kinerja: JAKI berhasil pada partisipasi prosedural (termasuk respons cepat awal), namun terhambat oleh proses tindak lanjut birokrasi, yang tercermin dalam dominasi sentimen negatif (62.89%) dan penurunan pengguna aktif. Hasil survei menunjukkan tingginya niat penggunaan JAKI sebagai sarana aspirasi (X: 4.25), tetapi keyakinan responden terhadap dampak substantif dan Akuntabilitas (Y: Efikasi Substantif) berada pada tingkat moderat (3.50). Kesenjangan antara partisipasi tinggi dan efikasi substantif yang rendah ini mengindikasikan risiko *Pseudo-Participation* dan kegagalan JAKI dalam mewujudkan *Digital Democracy* yang berkelanjutan. Tantangan utama berakar pada kelemahan *Cyber Governance* dan *bureaucratic mismatch*antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menuntut pergeseran fokus metrik kinerja dari *time-to-response* ke *time-to-resolution* untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: E-Participation, Aplikasi JAKI, Kesenjangan Akuntabilitas, Demokrasi Digital, Cyber Governance

Abstract

This study analyzes the implementation of E-Participation through the Jakarta Kini (JAKI) application during Governor Pramono's administration, focusing on the gap between technological promises and the realities of digital accountability. Using the theoretical frameworks of Open Government and Digital Democracy, this research adopts a quantitative method through an online survey (Likert scale) among JAKI users within UPNVJ to examine the relationship between the Intensity of JAKI Usage (Variable X) and the Level of Citizens' Digital Participation (Variable Y). Literature review confirms a dualism in performance: JAKI has succeeded in procedural participation (including rapid initial responses) but remains hindered by bureaucratic follow-up processes, reflected in the dominance of negative sentiment (62.89%) and the decline in active users. Survey results indicate a high intention to use JAKI as a medium for public aspiration (X: 4.25), yet respondents' confidence in its substantive impact and accountability (Y: Substantive Efficacy) remains at a moderate level (3.50). The gap between high participation and low substantive efficacy indicates a risk of pseudo-participation and JAKI's failure to achieve a sustainable Digital Democracy. The main challenge lies in weak Cyber Governance and bureaucratic mismatches among local government agencies (OPDs), necessitating a shift in performance metrics from time-to-response to time-to-resolution to restore public trust.

Keywords: *E-Participation, JAKI Super App, Accountability Gap, Digital Democracy, Cyber Governance*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi imperatif global bagi sektor publik, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) dan politik siber (*cyberpolitics*). Di Indonesia, dorongan ini termanifestasi melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Demokrasi lokal menjadi arena krusial bagi implementasi transformasi ini, menuntut inovasi yang menjembatani jarak antara birokrasi dan warga negara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri sebagai studi kasus utama dalam konteks ini, memposisikan diri sebagai *Jakarta Smart City* (JSC). Inti dari strategi digitalisasi Jakarta adalah peluncuran aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sebuah *super app*yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dan kanal partisipasi warga., JAKI, dengan fitur-fitur utamanya seperti JakLapor atau JakRespon, diharapkan menjadi manifestasi ideal dari *E-Participation* di tingkat lokal.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada kinerja JAKI dalam konteks *E-Participation* selama era kepemimpinan Gubernur Pramono. Kepemimpinan ini ditandai dengan penekanan eksplisit pada integrasi teknologi canggih, seperti Artificial Intelligence (AI), untuk mengoptimalkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik. Gubernur Pramono menekankan bahwa pemanfaatan AI, termasuk yang berkaitan dengan JAKI, harus mampu mengatasi tugas yang bersifat pengulangan data dan mempercepat layanan.

Namun, di balik narasi keberhasilan teknologi dan penghargaan (seperti AICTA 2023 dan WSIS 2022), terdapat kesenjangan kritis antara janji teknologi dan realitas partisipasi warga. Penelitian akademis menunjukkan adanya sentimen negatif yang mendominasi (mencapai 62.89% dari analisis komentar publik) terhadap aplikasi JAKI. Fenomena ini diperkuat dengan temuan penurunan jumlah pengguna aktif JAKI dari tahun 2021 hingga 2023. Kontradiksi antara *technological excellence* dan *democratic acceptance* mengisyaratkan bahwa pemerintah provinsi mungkin terjebak dalam perangkap *technological solutionism*, di mana adopsi teknologi dilihat sebagai solusi otomatis tanpa mengatasi hambatan akuntabilitas birokrasi. Kesenjangan ini mengancam substansi *E-Participation*, mengubahnya menjadi partisipasi prosedural semata.

Penelitian berjudul “Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta” (Vandito et al., 2023) mengulas JAKI sebagai manifestasi konsep Demokrasi Digital, berfokus pada peran JAKI sebagai 'wadah aspirasi' masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *e-government* harus selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* dan demokrasi. Penelitian Vandito et al. menjadi basis untuk memahami JAKI sebagai studi kasus implementasi *Digital Democracy* di tingkat lokal. Studi ini secara langsung mengidentifikasi JAKI sebagai platform aspirasi yang relevan dalam konteks Jakarta.

Lalu penelitian Sofiana (2023) yang berujudul “Analisis Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (JAKI)” juga menganalisis fitur Jak-Respon menggunakan kerangka *Open Government* (Transparansi dan Partisipasi). Temuan kunci adalah dominasi sentimen negatif (62.89%) dan penurunan signifikan pengguna aktif JAKI dari tahun 2021 hingga 2023.Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun JAKI memenuhi kepatuhan prosedural, kepuasan pengguna rendah. Penelitian ini secara langsung menggunakan Teori *Open Government* dan menyediakan data empiris yang krusial (sentimen negatif dan penurunan

pengguna) yang menjadi dasar argumentasi penelitian saat ini mengenai kesenjangan akuntabilitas digital.

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman penting terhadap fokus pada platform yang spesifik dan menggunakan menggunakan teori *Open Government*, terdapat celah yang akan dijadikan fokus daripada penelitian kami. Penelitian Vandito et al. kurang memberikan analisis komprehensif terhadap tantangan yang lebih luas, seperti kegagalan akuntabilitas (substantif) dan implikasi politik dari *pseudo-participation* yang muncul dari ketidakselarasan birokrasi. Sedangkan penelitian Sofiana belum menganalisis secara mendalam mengapa respon yang cepat secara prosedural tidak berkorelasi linier dengan akuntabilitas substantif, yang merupakan kunci kerusakan *trust* dan *Digital Democracy*.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama untuk menganalisis kinerja JAKI, yaitu Teori *Open Government*dan Teori *Digital Democracy*. *Open Government* (Pemerintahan Terbuka) didefinisikan sebagai filsafat tata kelola yang menekankan pada keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan warga negara. Teori ini beroperasi melalui tiga pilar: Transparansi, yang terwujud dalam JAKI melalui penyediaan informasi kota dan status laporan secara *real-time* , ; Partisipasi, yang diimplementasikan melalui fitur JakLapor/JakRespon sebagai kanal pengaduan resmi ; dan Kolaborasi, yang merupakan tingkat tertinggi keterlibatan warga. Teori *Open Government* relevan karena JakLapor secara eksplisit dirancang untuk mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Partisipasi. Kegagalan akuntabilitas tuntas dalam JAKI akan menghasilkan partisipasi simbolik (*pseudo-participation*), yang merupakan kegagalan *Open Government* substantif.

Selain itu, digunakan Teori *Digital Democracy* (Demokrasi Digital), yang berfokus pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan partisipasi, deliberasi, dan pengawasan warga negara dalam proses politik. Aspek utama teori ini adalah potensi peningkatan partisipasi dan pengawasan, serta dorongan terhadap akuntabilitas dan kepercayaan publik. Ketika platform seperti JAKI gagal memberikan solusi yang substantif, hal itu dapat mengikis kepercayaan dan mengurangi *Digital Efficacy* warga, yaitu keyakinan bahwa partisipasi mereka akan menghasilkan perubahan nyata. Oleh karena itu, Teori *Digital Democracy* digunakan untuk menganalisis dampak politik dan sosiologis dari JAKI; jika JAKI hanya fokus pada efisiensi teknologi (kecepatan *input* laporan) tetapi mengabaikan akuntabilitas penyelesaian masalah, maka Demokrasi Digital di Jakarta berisiko menjadi Demokrasi Digital Semu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berupaya menjelaskan hubungan antara dua variabel utama, yaitu intensitas penggunaan aplikasi JAKI (variabel independen X) dan tingkat partisipasi digital warga Jakarta (variabel dependen Y). Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena penggunaan aplikasi layanan publik, tetapi juga berusaha menguji sejauh mana penggunaan JAKI berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi warga dalam kehidupan demokratis di ruang digital. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini memungkinkan pengukuran yang objektif dan terukur terhadap perilaku serta persepsi warga, sehingga hasilnya dapat dianalisis secara statistik untuk menemukan pola hubungan yang signifikan antar variabel.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Populasi dalam penelitian ini adalah warga UPN "Veteran" Jakarta yang menggunakan aplikasi JAKI sebagai sarana pelaporan, kritik, maupun pemantauan layanan publik. Mengingat jumlah pengguna JAKI yang cukup besar dan tersebar di Lingkungan UPNVJ, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling. Teknik ini dipilih agar responden yang diambil benar-benar relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mereka yang telah menggunakan JAKI secara aktif. Untuk menjaga representasi wilayah, pengambilan sampel dapat pula dilakukan secara *proportionate stratified random sampling* berdasarkan wilayah Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui Survei Daring menggunakan Kuesioner Google Form yang disebarkan kepada pengguna aplikasi JAKI di berbagai Lingkungan UPNVJ. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti laporan Jakarta Smart City, publikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan., Data primer yang bersifat mentah dimasukkan sebagai Data Tambahan (*Supplementary Data*) dalam artikel ini.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel utama. Variabel Independen (X), yaitu Intensitas Penggunaan Aplikasi JAKI, didefinisikan sebagai sejauh mana warga memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melapor, memberi kritik, atau mengakses layanan publik. Indikatornya meliputi frekuensi penggunaan, jenis layanan yang digunakan, durasi penggunaan, serta interaksi yang terjadi antara pengguna dengan pemerintah melalui aplikasi. Sementara itu, Variabel Dependen (Y), yaitu Tingkat Partisipasi Digital Warga, didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan warga dalam proses politik atau pengawasan publik melalui kanal digital. Indikator yang digunakan antara lain kepedulian terhadap isu publik, kepercayaan terhadap kanal digital pemerintah, keterlibatan dalam diskusi publik *online*, serta rasa memiliki terhadap kebijakan publik yang dihasilkan. Kedua variabel ini diukur menggunakan instrumen kuesioner berbentuk skala Likert(1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju) untuk memudahkan analisis kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Open Government dan Kesenjangan Akuntabilitas (Tinjauan Literatur)

Secara teori, JAKI diakui telah mencapai pilar Transparansi dan Partisipasi prosedural dari *Open Government* (OG). Fitur JakLapor terbukti efektif dalam memfasilitasi dialog dua arah, bahkan menjadi kanal aduan paling banyak digunakan saat pandemi. Laporan UPTD menunjukkan respons awal terhadap laporan cukup cepat.

Namun, literatur terdahulu secara konsisten menyoroti Kesenjangan Akuntabilitas Substantif: meskipun respons awal cepat, proses tindak lanjut dan penyelesaian masalah di lapangan masih lambat, yang menunjukkan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud dalam praktik., Kegagalan substansi ini tercermin dalam temuan sekunder yang paling kritis: sentimen negatif yang mendominasi 62.89% dan penurunan jumlah pengguna aktif JAKI dari 2021 hingga 2023.

Analisis Data Survei: Intensitas Penggunaan (X) vs. Partisipasi Digital (Y) di Lingkungan UPNVJ

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan dari survei daring (G-Form) terhadap pengguna JAKI di lingkungan UPNVJ (N=8 pengguna aktif), ditemukan pola hubungan yang mendukung temuan literatur mengenai dualisme kinerja JAKI.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Intensitas Penggunaan dan Partisipasi Digital JAKI

Variabel	Indikator Kunci	Mean (Skala 1-5)	Kategori
Intensitas Penggunaan JAKI (X)	X10: Menganggap JAKI sebagai sarana penting untuk menyampaikan aspirasi warga	4.25	Tinggi
	X2: Melaporkan masalah di lingkungan sekitar (sampah, jalan rusak, dll)	3.88	Tinggi
	X5: Fitur-fitur dalam JAKI mudah digunakan	3.88	Tinggi
	X7: Merasa puas dengan kecepatan respon pemerintah di JAKI	3.50	Moderat
Tingkat Partisipasi Digital (Y)	Y6: Merasa menjadi bagian dari masyarakat digital yang peduli terhadap pemerintahan	4.00	Tinggi
	Y2: Percaya JAKI dapat meningkatkan transparansi pemerintah	3.75	Moderat
	Y7: Percaya laporan di JAKI dapat membawa perubahan nyata (Efikasi Substantif)	3.50	Moderat
	Y5: Merasa suara saya didengar melalui JAKI (Efikasi Prosedural)	3.38	Moderat

Hasil survei menunjukkan bahwa responden UPNVJ memiliki niat dan intensitas penggunaan JAKI yang tinggi. Indikator paling tinggi adalah X10 (Menganggap JAKI sebagai sarana penting untuk menyampaikan aspirasi warga) dengan rata-rata 4.25. Hal ini menegaskan bahwa kalangan muda meyakini potensi JAKI sebagai saluran Partisipasi OG. Demikian pula, indikator X2 (Melaporkan masalah) dan X5 (Fitur mudah digunakan) mendapatkan skor tinggi (masing-masing 3.88), menunjukkan bahwa dari segi akses dan penggunaan, JAKI berhasil menarik partisipasi.

Namun, skor kepuasan terhadap X7 (Puas dengan kecepatan respon pemerintah) berada pada tingkat moderat (3.50), mengindikasikan bahwa pengalaman *user* terhadap kecepatan respons tidak selalu seragam atau memuaskan, bahkan di kalangan pengguna yang melek teknologi. Temuan ini selaras dengan literatur yang mencatat adanya keluhan *respon lambat* di balik klaim kecepatan JAKI.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Pada variabel Partisipasi Digital (Y), terdapat dikotomi yang mencerminkan risiko *Digital Democracy* semu, Responden cenderung tinggi dalam menyetujui bahwa kanal digital seperti JAKI dapat meningkatkan transparansi pemerintah (Y2), mendukung pilar Transparansi OG. Meskipun responden setuju bahwa mereka *merasa menjadi bagian dari masyarakat digital yang peduli (Y6)*, keyakinan mereka terhadap dampak nyata cenderung moderat. Pada indikator 'Saya merasa suara saya didengar melalui aplikasi digital pemerintah seperti JAKI' (Y5) dan 'Saya percaya laporan saya di JAKI dapat membawa perubahan nyata (Y7)', skor yang diberikan mayoritas berada pada rentang 3 (Netral) hingga 4 (Setuju), namun juga terdapat skor rendah (2) yang signifikan. Bahkan, salah satu tanggapan terbuka menyebut JAKI "terlalu bertele-tele", yang menunjukkan adanya hambatan prosedural yang dirasakan.

Temuan kuantitatif ini secara tegas menyimpulkan bahwa tantangan JAKI bukanlah lagi masalah teknologi, melainkan masalah Cyber Governance dan birokrasi. Strategi Gubernur Pramono yang berfokus pada AI untuk efisiensi birokrasi hanya efektif dalam mengatasi tugas pengulangan data (*time-to-response*). Kegagalan dalam memastikan penyelesaian tuntas (memperbaiki *time-to-resolution*) merupakan masalah bureaucratic mismatch antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)., *Cyber Governance* yang kuat diperlukan untuk menyelaraskan SOP antar OPD dan memastikan bahwa teknologi JAKI tidak hanya berfungsi sebagai saluran pengaduan, tetapi juga sebagai alat pelacak kinerja akuntabilitas substantif, guna mengeliminasi risiko *Digital Democracy* semu dan memulihkan kepercayaan publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Aplikasi JAKI di era Gubernur Pramono berhasil mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Partisipasi prosedural dari Teori *Open Government*. Namun, temuan data primer dan sekunder secara konsisten menunjukkan kegagalan JAKI dalam mewujudkan Akuntabilitas Substantif, yang merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan *Digital Democracy*. Data survei kuantitatif menunjukkan tingginya niat dan intensitas penggunaan JAKI di kalangan mahasiswa (X), tetapi keyakinan mereka terhadap efikasi digital (perasaan didengar dan laporan membawa perubahan nyata, Y) berada pada tingkat moderat dan beragam (Y7: 3.50). Kesenjangan ini mengkonfirmasi risiko *Pseudo-Participation* yang diidentifikasi dalam literatur, yang ditandai oleh dominasi sentimen negatif (62.89%).Tantangan terbesar yang harus diatasi Pemprov DKI Jakarta adalah kelemahan *Cyber Governance* dalam menghilangkan *bureaucratic mismatch* antar-OPD untuk memastikan bahwa kecepatan respons digital diikuti oleh penyelesaian masalah yang substantif di lapangan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan strategis: Pertama, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan Penguatan Indikator Akuntabilitas Substantif dengan merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan metrik kinerja (KPI) JAKI, mengalihkan fokus dari *time-to-response* ke *time-to-resolution* (waktu penyelesaian masalah secara tuntas) ,. Kedua, diperlukan Harmonisasi Birokrasi dan *Cyber Governance* yang kuat, di mana Gubernur Pramono perlu memastikan koordinasi antar-OPD yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah berjalan lancar, menghilangkan *bureaucratic mismatch* ,. Implementasi ini harus didukung dengan sosialisasi intensif SK Sekda 99/2022 kepada semua

OPD/BUMD. Terakhir, strategi untuk mengatasi *digital divide* dan meningkatkan Literasi Digital Inklusif harus diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan JAKI secara efektif dan memahami hak partisipasi mereka

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Masa Depan

keterbatasan utama penelitian ini adalah penggunaan sampel *purposive* yang terbatas (warga UPNVJ), yang mungkin memiliki tingkat literasi dan akses digital yang lebih tinggi daripada populasi Jakarta secara umum. Oleh karena itu, penelitian masa depan disarankan untuk memperluas cakupan sampel agar lebih representatif terhadap populasi Jakarta, serta menggunakan analisis regresi untuk mengukur secara statistik hubungan sebab-akibat antara variabel Intensitas Penggunaan JAKI (X) dan Tingkat Partisipasi Digital Warga (Y).

DAFTAR PUSTAKA

Alfayn, M. A. N. (2022). From E-Government to Good Governance: Examining the Impact of Digitalization on Public Service Delivery in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, *4*(2), 19-40. https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873

Ernawati, D., Dwiarto, R., Aini, Y. N., Asropi, & Harsiwi, N. D. (2023). Responsive public complaint service innovation: The JAKI Application case in DKI Provincial Government. *PUBLICIA: Journal of Public Administration Science*, *8*(1), 1- 3. https://doi.org/10.26905/pjiap.v8i1.9136

Oludu, O. V., Kaya, T., & Karagozlu, D. (2025). Citizens' preference for e-participatory governance. *PloS one*, *20*(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306268

Paiman, Y. (2025, Juli 2). *Aplikasi JAKI Andalan Warga Jakarta, Intip 11 Fitur Terbarunya*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-7992160/aplikasi-jaki-andalan-warga-jakarta-intip-11-fitur-terbarunya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025, Juni 13). *JAKI hadir dengan wajah baru untuk Jakarta lebih nyaman*. Jakarta.go.id. https://www.jakarta.go.id/page/jaki-hadir-dengan-wajah-baru-untuk-jakarta-lebih-nyaman

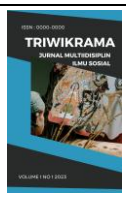
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025, Juli 24). *Dukung Penyusunan Peta Jalan AI, Gubernur Pramono: Jadikan Jakarta Kota Cerdas dan Modern*. Jakarta.go.id. https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/5742-SP-HMS-07-2025

Prasetia, I. P. S. D., Wijaya, K. A. S., Yudartha, I. P. D., & Savitri, R. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) di Provinsi DKI Jakarta. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *7*(1), 1-12. https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.2941

Ralina, A. S., Manar, D. G., & Erowati, D. (2024). IMPLEMENTATION OF JAKLAPOR AS A DIGITAL PUBLIC COMPLAINT SERVICE ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES OF DKI JAKARTA. *Journal of Politic and Government Studies*, *13*(3), 128-143. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/44838

Rochmani, S. A., & Aji, M. P. (2025). Pengaruh Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Pengaduan dan Pelayanan Publik di DKI Jakarta pada Tahun 2020. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *4*(2), 2157-2168. https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.5480

Savaş, S., & Karataş, S. (2022). Cyber governance studies in ensuring cybersecurity: an overview of cybersecurity governance. *International Cybersecurity Law Review*, *3*(1), 7-34. 10.1365/s43439-021-00045-4



Sofiana, A. (2023). Analisis Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (JAKI). *Journal of Social Contemplativa*, *1*(1), 44-53. https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.10

Subiyanto, R. F., Guffari, M. A., Saputra, A. A., & Nurdin, N. (2024). Mengkaji Dampak Implementasi Aplikasi JAKI Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik di Kota Jakarta. *Indonesian Journal of Social Development*, *1*(4), 14-14. https://10.1371/journal.pone.0306268

Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi Warga Melalui Media Digital dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, *2*(1), 109-124. https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.4426

Vandito, R. L., Paramesti, A., Aminudin, M. A. V., & Wulandari, L. (2023). Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta. *Jurnal Reinventing*, *5*(2), 70-84. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/id/article/view/1108

Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Opportunities and Challenges of Digital Democracy in Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *5*(1), 20-34. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.723

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 1-16. https://doi.org/10.18196/jphk.1101